



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Sekuritisasi Politik untuk Kemerdekaan Sudan Selatan

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Cyrillus Giannino Nanda S. B.

2017330038

Jakarta

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Sekuritisasi Politik untuk Kemerdekaan Sudan Selatan

Skripsi

Oleh

Cyrillus Giannino Nanda S. B.

2017330038

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si.

Jakarta

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

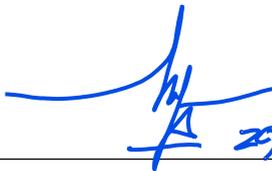
Nama : Cyrillus Giannino Nanda Suryo Bugiyanto
Nomor Pokok : 2017330038
Judul : Upaya Sekuritisasi Politik untuk Kemerdekaan Sudan Selatan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 22 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Mangadar Situmorang, Ph.D.

:  29/7/2021

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira : 

Anggota

Putu Agung Nara Indra, S.IP.,M.Sc. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cyrillus Giannino Nanda S. B.
NPM : 2017330038
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya Sekuritisasi Politik untuk Kemerdekaan
Sudan Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pertanyaan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pertanyaan ini tidak benar.

Jakarta, 13 Juli 2021



Cyrillus Giannino Nanda S. B.

ABSTRAK

Nama: Cyrillus Giannino Nanda S.B.

NPM: 2017330038

Judul: Upaya Sekuritisasi Politik Untuk Kemerdekaan Sudan Selatan

Sudan merupakan negara yang penduduknya, politiknya, dan hukumnya didominasi oleh Islam. Dominasi Islam mengakibatkan penduduk Kristen yang minoritas menjadi terkekang dan tereksplotasi. Semenjak keberhasilan *The National Islamic Front* (NIF) menjatuhkan pemerintahan Nimeiri, pemberlakuan hukum Islam semakin ketat dan perampasan hak politik penduduk semakin terlihat. *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) sebagai organisasi politik yang terbentuk untuk memperjuangkan hak politik dan kemerdekaan penduduk Kristen dengan melakukan segala upaya dari militer sampai ke diplomasi dan tandatangan perjanjian. Upaya militer tidak berujung baik dan memakan banyak korban, akan tetapi upaya yang dilakukan secara diplomatis dengan berdiskusi dan membuat perjanjian menghasilkan CPA yaitu perjanjian perdamaian dan pemulihan hak politik untuk penduduk Kristen. Jenderal Salva Kiir Mayardit berupaya untuk mendapatkan dukungan pihak eksternal, termasuk dukungan Gereja, agar jalannya *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dan menuju kemerdekaannya lebih terjamin. Peneliti menggunakan teori sekuritisasi *copenhagen school* untuk menganalisa ancaman penduduk Islam terhadap identitas penduduk Kristen dan upaya yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk menyelesaikannya. Peneliti menemukan bahwa CPA merupakan titik temu yang berhasil meningkatkan status politik dan memerdekakan penduduk Kristen Sudan menjadi Sudan Selatan.

Kata Kunci: NIF, penduduk Islam, penduduk Kristen, CPA, Jenderal Salva Kiir Mayardit, SPLM/A, hak politik, keamanan komunitas

ABSTRACT

Name: Cyrillus Giannino Nanda S.B.

NPM: 2017330038

Title: Means of Political Securitization for the Independence of South Sudan

Sudan is a country where the citizens, politics, and laws are dominated by Islamic values. The dominance of Islam caused the exploitation and restriction of Christian citizens. Since The National Islamic Front (NIF) succeeded in overthrowing the Nimeiri cabinet, the practice of Islamic laws is reinforced and stripping of rights in politics can be seen explicitly. Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) is a political organization established for citizens to fight for their political rights and freedom of Christian citizens by doing diplomacy, signing peace agreements, and fighting with their military power. Military means didn't end well and took many casualties, but the diplomatic attempts resulted in the signing of Comprehensive Peace Agreement (CPA) which can be called as a peace agreement that regains the political rights for Christian citizens. General Salva Kiir Mayardit tried to gain external support, including the Church so that the implementation of CPA and the fight for independence can be guaranteed. The author uses the Copenhagen school of securitization theory for analyzing threats that were posed by the Islamic citizens towards the identity of the Christians and also the effort taken by the securitizing actors to solve the conflict. The author found that CPA was the turning point in stabilizing the political status and successfully made the Christians to regain their independence by establishing a new independent country South Sudan.

Keywords: NIF, Islamic citizens, Christian citizens, CPA, General Salva Kiir Mayardit, SPLM/A, political rights, community security

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “**Upaya Sekuritisasi Politik untuk Kemerdekaan Sudan Selatan,**” sebagai syarat akhir mendapat gelar sarjana program studi Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini menggambarkan upaya sekuritisasi bidang politik oleh SPLM/A agar bisa memerdekakan penduduk Kristen Sudan bagian Selatan. General Salva Kiir Mayardit sebagai pemimpin SPLM/A bertanggung jawab dalam menjamin kemerdekaan anggotanya. Tindakan represif penduduk Islam yang terjadi semenjak kudeta NIF menyebabkan penduduk Kristen Sudan menderita. Hak-hak untuk berpartisipasi di politik negara dan kebebasan berpendapat jadi dibatasi dan hukum yang berlaku juga membatasi pergerakan penduduk Kristen Sudan. Maka dari itu, penelitian ini menggambarkan upaya aktor sekuritisasi untuk bisa memenuhi hak politik *referent objectnya* yaitu penduduk Kristen Sudan bagian Selatan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masukan yang harus diterima. Penulis terbuka akan saran dan masukan yang diberikan agar penulis dapat berkembang menjadi lebih baik. Meskipun demikian, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 12 Juli 2021

Cyrillus Giannino Nanda S.B.

2017330038

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui lembar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada diri sendiri karena mampu menyelesaikan proses perkuliahan selama empat tahun hingga proses pengerjaan skripsi.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungan dan berkatNya selama penulis hidup, khususnya selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa kehendak dan berkatNya penulis tidak akan mampu melewati proses perkuliahan, penulisan skripsi, dan kehidupan ini.

Kepada segenap keluarga penulis, Ayah, Ibu, dan kayak yang terus menunjukkan moral dan material yang pada saat ini belum dapat dikembalikan oleh penulis dan tidak memberikan tekanan sehingga penulis dapat menyelesaikan sekolahnya tepat waktu.

Kepada Mas Nyoman selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tegas memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini bisa meningkatkan mutu akademis penulis. Serta kerelaan beliau dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran meskipun penulis tidak langsung mengerti maksud dari petunjuk-petunjuk yang diberikan.

Kepada seluruh dosen dan karyawan Unpar yang telah membimbing penulis dan memberikan pelajaran baik secara formal di kelas atau pertemuan non formal di luar kelas. Bertukar ide secara akademis atau membahas hobi yang mampu meningkatkan kedekatan mahasiswa dengan dosen dan karyawan.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali pihak yang mempengaruhi penelitian sehingga dapat selesai tepat waktu. Mohon maaf apabila masih ada pihak yang tidak bisa disebutkan dalam lembaran ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR.....	III
UCAPAN TERIMAKASIH	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR SINGKATAN.....	VII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
1.2.1 <i>Deskripsi Masalah</i>	5
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	7
1.2.3 <i>Rumusan Masalah</i>	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
1.3.1 <i>Tujuan Penelitian</i>	9
1.3.2 <i>Kegunaan Penelitian</i>	9
1.4 KAJIAN PUSTAKA	9
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	13
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	18
1.6.1 <i>Metode Penelitian</i>	18
1.6.2 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	19

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	20
BAB II.....	19
UPAYA POLITIK PENDUDUK KRISTEN MENGHADAPI DISKRIMINASI PENDUDUK ISLAM	19
2.1 KONDISI PENDUDUK KRISTEN DI SUDAN	20
2.2 ANCAMAN POLITIK OLEH PENDUDUK ISLAM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS KRISTEN. 22	
2.2.1 <i>Penyangkalan terhadap Hak politik Minoritas</i>	24
2.2.2 <i>Bentuk-bentuk keterbatasan Identitas penduduk Kristen</i>	26
BAB III.....	29
DAMPAK SEKURITISAI POLITIK TERKAIT IDENTITAS PENDUDUK KRISTEN SUDAN SEHINGGA BERHASIL MEMERDEKAKAN SUDAN BAGIAN SELATAN.....	29
3.1 RESPON AKTOR SEKURITISASI MENGENAI DISKRIMINASI PENDUDUK KRISTEN.....	30
3.1.1 <i>Keterlibatan SPLM/A dan Gereja Dalam Sekuritisasi Politik Sudan.....</i>	34
3.2 <i>SPEECH ACT</i> MENGENAI <i>SELF DETERMINATION</i> UNTUK MELAWAN DISKRIMINASI PENDUDUK KRISTEN.....	37
3.2.1 <i>Aspek Internal dan Eksternal</i>	44
3.2.2 <i>Tiga Unit dalam Speech Act</i>	45
3.3 DAMPAK TERHADAP KONDISI POLITIK PENDUDUK SUDAN SELATAN SETELAH PENERAPAN CPA	47
BAB IV	50
KESIMPULAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR SINGKATAN

- ABC: *Abyei Boundary Commission*
- AEC: *Assessment and Evaluation Commission*
- AS: Amerika Serikat
- CPA: *Comprehensive Peace Agreement*
- GoS: Government of Sudan
- GoSS: *Government of South Sudan*
- HAM: Hak Asasi Manusia
- HI: Hubungan Internasional
- IGAD: *Intergovernmental Authority for Development*
- MB: *Muslim Brotherhood*
- NCP: *National Congress Party*
- NIF: *The National Islamic Front*
- NPC: *National Petroleum Commission*
- PBB: Perserikatan Bangsa Bangsa
- SEF: *Sudan Ecumenical Forum*
- SPLA: *Sudan People's Liberation Army*
- SPLM/A: *Sudan People's Liberation Movement/Army*
- SPLM: *Sudan People's Liberation Movement*
- SSRA: *South Sudan Referendum Act*
- SSRC: *South Sudan Referendum Commission*
- UE: Uni Eropa
- UK: *United Kingdom*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diskriminasi atas suatu kelompok masih sering terjadi di masyarakat dan rentan menimpa kelompok minoritas. Hal ini terjadi di Sudan Selatan sebelum mereka memisahkan diri dari Sudan. Pada masa itu, Sudan yang dipimpin oleh Dr. Hassan Al-Bashir dari *The National Islamic Front* (NIF) mempunyai mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Penduduk Kristen Sudan adalah kelompok minoritas dan terletak di bagian Selatan Sudan. Semenjak NIF mendominasi pemerintahan, penduduk Kristen Sudan mengalami diskriminasi secara politik yaitu hilangnya hak untuk berpendapat dan hak untuk memilih. Selain itu, diskriminasi agama dan ras yang dialami oleh penduduk Kristen membuat identitas mereka juga terancam. Sebagai kelompok minoritas, penduduk Kristen Sudan mencoba untuk membuat perkumpulan bagi minoritas agar mereka dapat membuat persatuan dalam menghadapi represi dari mayoritas penduduk Sudan.¹ Persatuan ini dibentuk untuk melindungi kelompok minoritas dan mempunyai keinginan untuk membentuk suatu pergerakan dalam rangka meraih kembali hak politik dan identitas penduduk Kristen di Sudan sempat terjadi pemberontakan oleh pasukan gerilya dari Selatan akibat pemerintahan yang tidak adil dalam memenuhi janjinya

¹ Douglas H. Johnson, "New Sudan or South Sudan? The Multiple Meanings of Self-Determination in Sudan's Comprehensive Peace Agreement," *Civil Wars* 15, no. 2 (2013): hlm, 142.

yang berawal pada tahun 1963 dan berakhir di tahun 1972 dengan adanya penanda tanganan perjanjian Adis Ababa. Perjanjian ini menghasilkan otonomi daerah untuk Sudan bagian Selatan namun, pada 1983 Presiden Nimeiri secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut.² Akibat keputusan sepihak Nimeiri, John Garang yang pada saat itu menjabat sebagai Kolonel di militernya memutuskan untuk mengeluarkan diri. John Garang bersama dengan sekumpulan orang yang berjuang untuk kemerdekaan Sudan Selatan membentuk organisasi bernama *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) yang anggotanya berasal dari militer dan rakyat biasa.

Semenjak terbentuknya SPLM/A di tahun 1983, mereka mendapat dukungan dari Ethiopia dengan ditetapkannya sebuah manifesto politik serta dukungan melalui bantuan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah pelatihan *Red Army* yang merupakan pelatihan calon anggota *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) dari usia dini. Keterlibatan Ethiopia dalam *Red Army* ini dianggap ingin mendoktrinasi paham Marxisme karena dalam pelatihannya mereka menekankan bahwa komunisme dapat membantu menyatukan Sudan dan mereka akan mengenalkan sebuah sistem sosialisme baru dalam menyatukan Sudan.³ Pada masa itu, aktor politik Sudan meremehkan relevansi agama dan kepercayaan terhadap usaha pembentukan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dibawa oleh Ethiopia akan terciptanya negara yang sekuler.⁴ Melalui hal ini SPLA mulai

² Ibid. hlm, 142.

³ Christopher Tounsel, "Khartoum Goliath: *SPLM/SPLA* and Martial Theology during the Second Sudanese Civil War," *Journal of Africana Religions* 4, no. 2 (2016): hlm, 131.

⁴ Ibid, hlm, 131.

condong ke sosialisme dan menjauh dari kekristenannya, akan tetapi masih ada yang mempertanyakan kelayakan dalam membentuk persatuan Sudan melalui sosialisme. Faktanya dibuktikan dengan dua peristiwa penting yaitu; Pertama adanya *The National Islamic Front* (NIF). Organisasi politik yang berlandaskan agama Islam ini dipimpin oleh President Omer al-Bashir dengan tujuan menyebarluaskan ajaran Sharia di seluruh Sudan. Peristiwa kedua adalah hancurnya pangkalan militer gabungan SPLA dan Ethiopia yang mengakibatkan hilangnya komunikasi antara kedua aktor dan mendekatkan kembali SPLA dengan gereja.⁵

John Garang sebagai aktor utama harus berusaha menyadarkan adanya ancaman politik yang datang dari penduduk Islam. Caranya adalah dengan mencari dukungan melalui perangkat-perangkat yang dapat membantu aktor meningkatkan kesuksesan. Dukungan tersebut dapat datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh perangkat politik yang bisa digunakan aktor untuk menyadarkan adanya ancaman adalah militer. SPLM/A merupakan partai politik hasil penggabungan komunitas rakyat dan militer. Mereka dapat membantu aktor sekuritisasi untuk meningkatkan kesadaran penduduk Kristen akan adanya ancaman politik dari penduduk Islam. Selain militer, media juga bisa membantu menyelesaikan misinya. Radio SPLA menjadi media yang membantu meningkatkan kesadaran akan ancaman militer akan tetapi, mereka tidak mempunyai stasiun tetap karena sudah dihancurkan pada tahun 1992. Kehancuran stasiun tetap radio SPLA tidak menghentikan upaya mereka untuk terus melakukan

⁵ Ibid, hlm. 131-132

siaran dengan cara mobilisasi dari satu titik ke titik yang lainnya dan merekrut anggota baru dan meningkatkan kesadaran akan ancaman politik.

Bantuan aktor sekuritisasi tidak hanya datang dari dalam negeri dan orang sekitarnya. Mereka bisa mencari bantuan juga keluar negeri seperti yang dilakukan oleh Jenderal Salva Kiir Mayardit yaitu mencari dukungan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) yang beranggotakan negara Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, dan Sudan. Jenderal Salva Kiir berhasil mendapatkan dukungan mereka karena adanya kesamaan identitas yaitu agama. Dukungan PBB terlihat dari diselenggarakannya misi perdamaian kepada komunitas tersebut. Dukungan PBB juga bisa dikatakan ada hubungannya dengan dukungan IGAD. Hal ini dapat dilihat ketika mereka berani menjadi pihak ketiga mengawasi penandatanganan CPA antara SPLM/A dengan *Government of Sudan* (Gos). Kedua organisasi telah membantu SPLM/A dalam membuat perjanjian perdamaian atas hasil dari perlawanan yang dilakukan secara politik dengan menggelar demonstrasi dan kampanye penuntutan hak politik dan identitas. Bantuan yang berasal dari pihak eksternal membuat kemerdekaannya terjamin karena GoS tidak bisa melawan *power* yang dimiliki kedua organisasi.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui cara Salva Kiir memimpin SPLM/A menyadarkan penduduknya bahwa mereka sedang terancam oleh penduduk Islam.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dalam menjalankan proses perdamaian, perlu ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor di Sudan bagian Selatan. Dalam meningkatkan kesadaran akan adanya ancaman yang datang dari penduduk Islam, kerjasama aktor dan pemilihan aktor yang tepat perlu terlihat dalam penelitian. Kali ini, aktor yang berupaya menyadarkan penduduknya akan adanya ancaman adalah SPLM/A dibawah pimpinan Salva Kiir. Untuk bisa memecahkan konflik ini tentunya tidak semulus yang dibayangkan dan tidak semua menghasilkan keputusan yang sama seperti Sudan Selatan yaitu merdeka. Pada konflik ini, aktor yang melakukan penyadaran akan adanya konflik juga mempunyai konflik internal yang perlu diatasi oleh mereka. Untuk melihat upaya yang dilakukan aktor, maka penulis bisa memberitahukan bahwa ada beberapa peristiwa yang penting dalam konflik antara penduduk Kristen dan penduduk Islam Sudan.

Proses menuju kestabilan politik di wilayah Selatan Sudan ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting yang berhasil membangun dinamika politiknya. Selain itu, perjanjian perdamaian yang diciptakan juga ikut mempengaruhi proses politik bagian Selatan Sudan. Salah satu peristiwa penting pertama yang menjadi perjuangan penting adalah terbentuknya NIF. NIF merupakan partai politik yang didirikan oleh Umar Hasan al-Bashir dan Hasan al-Turabi dengan latar belakang islam ekstrimis. Mereka bertujuan menjatuhkan presiden Nimeiri dengan dukungan saudara muslimnya untuk

menciptakan negara Islam di Sudan. Organisasi politik ini melakukan kudeta pada masa pemerintahan Nimeiri dan peristiwa ini juga menyebabkan kematian sebanyak dua juta penduduk Selatan Sudan. Pada tahun 1989, kerjasama antara Sudan dan Ethiopia juga dimusnahkan akibat dari kudeta NIF yang berhasil menghancurkan pusat pelatihan militer gabungan SPLM/A dan Ethiopia. Pusat militer tersebut juga menjadi tempat penyimpanan logistik untuk militer dan sebanyak 350.000 warga harus lari dari tempat tersebut. Kejadian ini kemudian mengakibatkan SPLM/A untuk kembali mendukung dan percaya dengan gereja. Hal tersebut memperbaiki keadaan politik SPLM/A

Peristiwa kedua pada tahun 2005 dikenal dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Sudan dan Selatan Sudan yang dikenal sebagai CPA. Peristiwa tidak terduga terjadi tiga minggu setelah penandatanganan CPA yaitu meninggalnya John Garang. Kejadian tersebut memicu kemunculan dua tokoh yang ingin merebut kepemimpinan SPLM/A yaitu Salva Kiir dan Riek Machar. Salva Kiir dikenal oleh penduduk Selatan Sudan sebagai seorang pemimpin perang yang ditakutkan sedangkan Riek Machar masuk menjadi anggota SPLM/A melalui jalur umum karena beliau adalah rakyat biasa sebelumnya. Salva Kiir kemudian dinaikan menjadi pemimpin SPLM/A dan otomatis menggantikan John Garang yang juga menjabat sebagai pemimpin *Government of South Sudan* (GoSS). Salva Kiir dan Riek Machar menyatukan kekuatannya dalam SPLM/A yang baru, akan

tetapi masih banyak tokoh politik di belakang Salva Kiir tidak menyukai Riek Machar sehingga kondisi politik SPLM/A belum dewasa.

Peristiwa ketiga yang mempengaruhi pergerakan politik SPLM/A terjadi pada tahun 2011. Tahun ini sangat penting dalam perkembangan SPLM/A dan Sudan karena di tahun tersebut mereka berhasil memerdekakan dirinya dan mereka mulai mengalami peningkatan dalam kestabilan politiknya. Dalam tahun ini terjadi dua kejadian penting dalam sejarah SPLM/A selain memerdekakan dirinya dari Sudan. Kejadian kedua adalah dalam tahun yang sama juga sebelum kemerdekaan Sudan Selatan, mereka berkonflik dengan pemerintah Sudan karena memperebutkan daerah Heglig yang kaya akan minyak. Konflik ini berlangsung sebelum 2011, akan tetapi pada tahun tersebut kedua pihak mencapai persetujuan dan beberapa minggu setelahnya SPLM/A berhasil memerdekakan Sudan Selatan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai sekuritisasi Salva Kiir dan SPLM/A dalam menangani represi militer Presiden Omer al-Bashir melalui organisasi politik NIF. Penelitian akan dimulai pada tahun 1989 hingga 2011. Pada tahun 1989 NIF terbentuk dan memulai dominasinya untuk menyebarluaskan ajaran Islam di Sudan serta awal mula terjadinya perpecahan politik bagian Selatan Sudan dan penelitian akan diakhiri pada tahun 2011 karena kemerdekaan Sudan Selatan yang menandakan situasi politik Sudan Selatan yang membaik.

Penulis juga akan menggunakan teori sekuritisasi *Copenhagen school* yang fokus utamanya terdapat di sector politik. Hal ini dilakukan penulis karena aspek-aspek yang diancam oleh penduduk Islam adalah aspek-aspek politik seperti diambilnya kebebasan berpendapat penduduk Kristen, hak untuk memilih dalam pemilu, dan hak untuk mempunyai kewarganegaraan. Maksud dari diambil hak kewarganegaraan adalah penduduk Kristen tidak bisa secara utuh menikmati hak-hak yang dimiliki seorang warganegara karena pergerakan mereka dibatasi oleh penduduk Islam. Fokus utama pembahasan sekuritisasi politik akan penulis lihat dari komunitas yang terlibat dan identitas yang secara perlahan hilang karena adanya larangan untuk menjalankan kegiatan agamanya sebagai umat Kristen. Penulis juga memilih konsep tersebut karena terlihat upaya-upaya yang dilakukan aktor dalam menyadarkan ancaman yang datang dari penduduk Islam. Upaya seperti meraih kepercayaan organisasi, kepercayaan penduduk, dan membuat protokol sebagai bentuk nyata upaya peningkatan kesadaran akan ancaman.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa **“Bagaimana sekuritisasi politik terkait ancaman identitas terhadap penduduk Kristen di Sudan berhasil memerdekakan Sudan Selatan?”**

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara Salva Kiir sebagai pemimpin SPLM/A dapat melakukan sekuritisasi untuk penduduk Kristen Sudan bagian Selatan sebelum kemerdekaannya melawan represi dari penduduk Islam Sudan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pembaca sebagai bahan bacaan yang bermanfaat khususnya melihat upaya yang dilakukan oleh aktor menghadapi konflik yang datang dari dalam negerinya sendiri dan upaya dalam meningkatkan kesadaran komunitasnya bahwa adanya ancaman yang datang dari pihak lain.

1.4 Kajian Pustaka

Untuk memperdalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa literatur yang memberikan latar belakang masalah di Sudan dan Sudan Selatan, serta memberikan deskripsi perjuangan yang dilalui oleh Salva Kiir dan SPLM/A dalam menghadapi ancaman.

Berdasarkan literatur berjudul “*New Sudan or South Sudan? the Multiple Meanings of Self-Determination in Sudan’s Comprehensive Peace Agreement*,” menjelaskan sejarah dari konflik yang terjadi di Sudan. Pilihan yang diambil pada

awalnya yaitu persatuan seluruh Sudan dan konsekuensi yang diterima ketika menjalankan pilihan tersebut. Dibahas juga mengenai determinasi Sudan Selatan yang akhirnya mengakibatkan pisahnya Sudan Selatan dengan Sudan. Konflik pertama terjadi pada tahun 1950-an ketika Sudan bagian Selatan merasakan represi dari penduduk mayoritas yang memeluk Agama Islam. Kemudian, literatur ini juga membahas mengenai kerjasama yang dilakukan SPLA selama masa perjuangan mereka. Pergerakan yang mulanya di pimpin oleh John Garang menginginkan persatuan seluruh Sudan, akan tetapi hal tersebut ada konsekuensinya dan ternyata kejadian tersebut nyata setelah tahun 1989 ada konflik antara SPLA dengan NIF. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai daerah di Afrika sekitar Sudan yang tidak mendapatkan perhatian seperti di pusatnya. SPLA mempunyai keinginan untuk membawa daerah-daerah ini seperti Dinka, Kordofan, dan Nuba.⁶ Determinasi tersebut kemudian memunculkan semangat baru bagi SPLA dan memunculkan negara baru juga di dunia.

Pada literatur kedua yang berjudul “*The Sudan Since 1989: The National Islamic Front Rule*,” menceritakan mengenai Sudan sebagai sebuah negara yang diakui sebagai negara dengan penduduk yang memeluk agama Islam paling banyak.⁷ Meskipun begitu, di bagian Selatan Sudan, terdapat penduduk yang beragama Kristen dan disana mereka menjadi mayoritas sehingga itu memunculkan sebuah masalah dan menjadi perang sipil yang dikenal sebagai *southern problem*. Pembahasan yang ada di jurnal berasal dari tahun 1955, akan tetapi kali ini peneliti

⁶ Douglas H. Johnson, “New Sudan or South Sudan? The Multiple Meanings of Self-Determination in Sudan’s Comprehensive Peace Agreement,” *Civil Wars* 15, no. 2 (2013): hlm, 146.

⁷ Carolyn Fluehr-Lobban dan Richard Lobban, op. cit. hlm, 1

akan melakukan penelitian mulai dari tahun 1989 sehingga dalam literatur, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada tahun tersebut yang juga menjadi pembahasan inti jurnal yang ditulis oleh *Carolyn Fluehr-Lobban dan Richard Lobban* mengenai pembentukan NIF dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan pemerintahan Sudan. Pada literatur ini ditekankan bahwa krisis kemanusiaan menjadi semakin tinggi akibat pemerintahan NIF. Pemberlakuan hukum Shari'a ditegaskan oleh Umar Hasan al-Bashir dan beliau tidak menerima adanya hukum atau partai tertentu yang menentang dia.⁸

Literatur ketiga dengan judul "*The Political Crisis in South Sudan*," mendeskripsikan tentang perpecahan politik yang terjadi di Sudan Selatan dari tahun 1990an. Perpecahan utama yang paling mempengaruhi stabilitas politik Sudan Selatan terjadi pada tahun 2005 pasca penandatanganan CPA.⁹ Kematian John Garang tiga minggu setelah penandatanganan CPA mengakibatkan perpecahan yang besar karena setelah peristiwa tersebut, orang yang menduduki posisi kedua dan ketiga SPLA yaitu Salva Kiir dan Riek Machar memperebutkan posisi tersebut. Salva Kiir merupakan seorang veteran perang yang dipercayai oleh prajuritnya dan beliau juga salah satu pendiri SPLA bersamaan dengan John Garang.¹⁰ Di sisi lain, Riek Machar berhasil menjadi bagian dari perjuangan SPLA bukan dari militer melainkan dari rakyat sipil. Beliau memisahkan diri dengan John Garang pada tahun 1991 karena mereka mempunyai perbedaan ideologi.¹¹

⁸ *ibid*, hlm. 4

⁹ Douglas H. Johnson, "The Political Crisis in South Sudan" *African Studies Review* 57 no. 3 (2014): hlm, 168.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 168.

¹¹ *Ibid*, hlm. 168.

Berdasarkan hal tersebut, kedua tokoh yang memperebutkan kekuasaan mempunyai latar belakang yang berbeda, akan tetapi yang akhirnya terpilih dan dipercayai oleh rakyat Sudan Selatan adalah Salva Kiir. Meskipun begitu, Riek Machar tidak menyerah dalam melakukan perjuangan yang diinginkan dan pada tahun 2008 beliau menyatakan dirinya akan maju menjadi Presiden Sudan Selatan.¹² Kontestasi kursi Presiden ini tidak lama surut karena Riek Machar tidak dapat melakukan banyak karena adanya wewenang khusus yang dimiliki Presiden dan kursi Wakil Presiden juga tidak dibuka untuk pemilihan umum. Menanggapi ketidak senangan tersebut, pihak oposisi Salva Kiir bersama dengan pemberontak dari Khartoum mencoba untuk membuat masalah di daerah minyak yaitu di bagian utara Nile, Unity, dan Jonglei.¹³

Menurut ketiga literatur tersebut, dijelaskan bahwa konflik yang terjadi antara penduduk Sudan bagian Utara dan Sudan bagian Selatan terlihat dari latarbelakang ras dan agama kedua penduduk. Serta terdapat juga bukti bahwa adanya krisis politik yang mengakibatkan ketidakadilan. Ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Kristen dilakukan oleh aktor politik yaitu NIF di Sudan. Selain adanya konflik antara penduduk Kristen dan NIF, ada juga perpecahan yang terjadi dalam organisasi politik SPLM/A yang mendukung penduduk Kristen. Berdasarkan ketiga literatur tersebut, pertanyaan penelitian bisa dijawab dengan cara melihat keterhubungan teori sekuritisasi dan tindakan yang dilakukan oleh aktor. Akan tetapi, untuk bisa menjawab secara utuh pertanyaan penelitian perlu adanya peran

¹² Ibid, hlm. 169.

¹³ Ibid, hlm. 169.

teori yang sesuai untuk menjawab konflik politik dan identitas yang terjadi pada penduduk Kristen di Sudan bagian Selatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam membahas konflik yang terjadi antara penduduk Kristen Sudan bagian Selatan dan penduduk Islam Sudan bagian Utara, penulis memutuskan untuk menggunakan teori keamanan yaitu sekuritisasi. Untuk bisa mengetahui apakah suatu isu internasional bisa dipandang sebagai isu keamanan atau tidak kita perlu mengetahui juga apa makna dari keamanan itu sendiri berdasarkan sudut pandang hubungan internasional (HI). Keamanan sering dikaitkan dengan keamanan penduduk seperti pengamanan rakyat sipil dan fungsi dari satuan kepolisian, sedangkan keamanan internasional bisa dikatakan mempunyai arti yang berbeda.¹⁴ Keamanan internasional mempunyai hubungan yang erat sejak lama dengan tradisi dari *power politics*.¹⁵ Maksud dari keamanan internasional masih erat dengan tradisi *power politics* adalah bahwa keamanan internasional masih dipandang sebagai *survival* yang mengartikan bahwa objek keamanan adalah negara tapi juga menyangkut pautkan unsur negara seperti pemerintah, daerah yang dikuasai, dan penduduknya.¹⁶

Pandangan mengenai keamanan pasca perang dingin menjadi semakin kompleks dimana sekarang sudah muncul pertanyaan mengenai konsepsi keamanan

¹⁴ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, *Security A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm. 21.

¹⁵ Ibid, hlm. 21.

¹⁶ Ibid, hlm. 21.

itu sendiri yang sekarang bisa dibilang tidak hanya muncul dari negara dan kekuatan militernya. Munculnya pertanyaan mengenai konsep keamanan sekarang bisa berasal dari organisasi atau muncul dari akademisi yang meneliti soal perdamaian, politik ekonomi internasional, dan kajian keamanan.¹⁷ Kajian keamanan sendiri bisa dilihat dari perspektif yang luas dan perspektif yang sempit dimana perspektif sempit mengartikan bahwa keamanan hanya benar-benar urusan negara dan kekuatan militer negara bersangkutan sedangkan perspektif yang lebih luas menyangkut pautkan masalah negara dan militer dengan masalah individu dan organisasi internasional lainnya serta memasukkan aspek lain juga dalam keamanan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.¹⁸

Copenhagen school mempunyai hubungan langsung dengan penelitian Barry Buzan yang memandang bahwa keamanan bisa dibagi kedalam lima sektor yaitu: militer, lingkungan, ekonomi, politik, dan sosial.¹⁹ Penelitian Barry Buzan yang menyatakan bahwa keamanan hanya dilihat dari kelima hal tersebut mengartikan bahwa negara masih menjadi objek keamanan sedangkan yang dilihat oleh teori *Copenhagen School* adalah adanya dualisme pandangan mengenai objek keamanan yaitu keamanan negara dan keamanan penduduk.²⁰ *Copenhagen School* juga merupakan diskusi yang muncul akibat dari perspektif objektif dan subjektif keamanan yang dimana kedua hal tersebut menjadi perdebatan panjang di kalangan akademisi kajian keamanan. Ole Waever mencoba untuk menengahi hal tersebut

¹⁷ Ibid, hlm. 1.

¹⁸ Ibid, hlm. 2-3.

¹⁹ Hawre Hasan Hama, "State Security, Societal Security, and Human Security," *International Relations* 21, no. 1 (2017): hlm. 4.

²⁰ Ibid, hlm. 4.

dan memunculkan keyakinan bahwa keamanan muncul dari sebuah *speech act* yang diterima oleh penduduk.²¹ Proses sekuritisasi itu sendiri yang dipengaruhi oleh *Copenhagen school* dipercayai bahwa sebuah isu yang dianggap biasa saja/tidak penting bisa menjadi sebuah isu yang sangat penting (diprioritaskan) apabila ada *speech act* yang disetujui oleh *target audience* muncul dari *securitizing actor*. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah *securitizing actor* dapat memunculkan *existential threat* apabila mereka menganggap suatu isu menjadi ancaman bagi manusia/negara.²² Perlu diperhatikan pentingnya persetujuan sebuah isu oleh *target audience* supaya ancaman yang diangkat oleh aktor bisa dikategorikan berhasil menjadi objek sekuritisasi. Khusus membahas mengenai *speech act*, ada dua aspek yang menentukan kebenaran suatu *speech act* yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal mengatakan bahwa bentuk sekuritisasi harus mengikuti Bahasa sekuritisasi yaitu menyusun rencana ancaman eksistensial, *point of no return*, dan cara untuk keluar dari ancaman.²³ Aspek Eksternal mempunyai dua kondisi khusus. Pertama adalah aktor sekuritisasi harus mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, aktor harus mempunyai otoritas yang tinggi meskipun belum tentu aktor berasal dari pemerintahan. Kedua, adalah ancaman datang dari objek tertentu yang secara umum dianggap mengancam.

Keamanan politik menjadi salah satu aspek non militer dalam sekuritisasi pasca perang dingin yang membahas mengenai stabilitas organisasi yang ada di tatanan

²¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 180.

²² *Ibid*, hlm. 180-181.

²³ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, *op. cit.* hlm. 33

sosial.²⁴ Sektor ini melihat perlunya memperhatikan sekuritisasi yang berfokus kepada hak asasi manusia (HAM), kebebasan individu, yang membuat fokus utama keamanan politik berada pada level individu, dan ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pentingnya aspek non-militer yang harus diperhatikan oleh organisasi politik selain negara. Kedua, pentingnya hukum dan komunitas internasional.²⁵ Sektor politik memang dikenal sebagai sektor yang sangat luas karena dapat dikatakan bahwa segala hal mengenai keamanan adalah politik.²⁶

Dalam membahas lebih dalam mengenai *political security*, perlu dipahami juga bahwa dalam suatu negara, ada peran komunitas sebagai roda penggerak politik sebuah negara. Komunitas juga menjadi salah satu landasan untuk keamanan, karena dalam komunitas bisa terjadi pertukaran pikiran, dan komunitas dapat membentuk norma yang sama dalam memahami keamanan.²⁷ Komunitas membuka pandangan baru dalam keamanan yang biasanya selalu berhubungan dengan aktivitas militer sebuah negara, sekarang keamanan menghubungkan aspek lain seperti lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan umum.²⁸ Keamanan komunitas diharapkan dapat digunakan dalam studi HI untuk memahami keamanan politik di daerah yang berbeda. Untuk mencapai hal tersebut, hanya dibutuhkan *sampling regional* dan *historical*.²⁹ Dalam buku Adler dan Barnett, dinyatakan bahwa ada beberapa pandangan mengenai keamanan komunitas, tapi mereka sudah

²⁴ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, op. cit. hlm. 141.

²⁵ Ibid, hlm. 141.

²⁶ Ibid, hlm. 142.

²⁷ Emanuel Adler dan Michael Barnett, *Security Communities*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 4.

²⁸ Ibid, hlm. 4.

²⁹ Ibid, hlm. 16

mengelompokkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai secara teoritis keamanan komunitas yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: 1. Kondisi yang memicu; 2. Variabel proses (transaksi, organisasi, dan pembelajaran sosial) dan Variabel struktur (ilmu dan *power*); 3. Identitas kolektif dan kepercayaan.³⁰ Ketidakamanan komunitas muncul ketika sebuah komunitas dalam penduduk merasa identitasnya terancam oleh imigrasi, akulturasi, dan imperialisme kultural.³¹

Keamanan komunitas yang disinggung oleh Mely Caballero-Anthony membahas mengenai definisi keamanan komunitas itu sendiri berdasarkan UN. Menurut mereka, keamanan komunitas menggabungkan keamanan baik dari kelompok dan individu sehingga sebuah ancaman yang muncul dan menargetkan individu bisa disatukan menjadi ancaman komunitas juga.³² Ketidakamanan komunitas muncul dari berbagai aspek seperti politik, budaya, dan agama. Diskriminasi politik muncul karena pertama, adanya penolakan hak politik seperti hak memilih, mempunyai jabatan, bergabung dengan militer, dan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.³³ Kedua adalah diskriminasi yang muncul akibat dari perbedaan budaya dan agama yang salah satu sumbernya adalah keluhan dan diskriminasi kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, Sudan bagian Selatan mengalami diskriminasi budaya dan agama sebelum masa kemerdekaannya. Mereka mendapat ancaman dari kelompok

³⁰ Ibid, hlm. 17

³¹ Mely Caballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security: A Transnational Approach*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2016.) hlm. 81

³² Mely Caballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach, Conflict and Community Security*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2016) hlm, 3

³³ Mely Caballero-Anthony, *An Introduction to Non-Traditional Security: A Transnational Approach*, op. cit. hlm. 83

³⁴ Ibid, hlm. 84

mayoritas yang beragama Islam dari Sudan. Tujuan kelompok mayoritas Sudan yang memegang kekuasaan pada waktu itu adalah Arabisasi yang ditargetkan kepada penduduk Kristen Sudan bagian Selatan.

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis dapat mendeskripsikan sekuritisasi dengan konflik yang terjadi. Pada konflik antara penduduk Kristen dan Islam di Sudan, aktor sekuritisasi dari pihak penduduk Kristen adalah Salva Kiir selaku pemimpin SPLM/A yang didukung oleh mayoritas penduduk. *Referent object* adalah penduduk Kristen karena mereka mengalami diskriminasi dari penduduk Islam, *speech act* adalah *self-determination* yang akan dilihat oleh peneliti pada bab-bab selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh aktor. *Target audience* dari *speech act* tersebut yaitu penduduk Kristen karena mereka terkena dampak paling besar dan merasakannya secara langsung. Penulis memilih teori ini karena adanya cara untuk bisa mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan upaya yang mereka lakukan. Selain itu, penulis juga mengambil sektor politik dan fokus ke identitas karena menurut penulis sektor tersebut masih belum banyak dibahas dan dalam bab-bab selanjutnya penulis menyatakan bukti-bukti yang konkrit untuk melihat konflik yang terjadi dari aspek politik khususnya identitas suatu organisasi/komunitas.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis dan memahami arti individu atau grup

dalam masalah sosial.³⁵ Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti mempunyai kebebasan dalam menginterpretasi hasil risetnya dan memunculkan pemahaman baru sesuai dengan keinginan dan kecocokan data dengan peneliti. Dalam melakukan studi kualitatif HI, Klotz dan Prakash mengatakan bahwa perlu adanya studi akan kebijakan internasional dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berskala *micro-historical*.³⁶

Penelitian dengan metode kualitatif akan dilakukan dengan menganalisis buku, jurnal, berita jurnal, dan menginterpretasikan data tersebut untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan metode kualitatif untuk melakukan studi pustaka. Sebagai referensi, peneliti akan mengakses sumber data publik melalui buku, jurnal, dan sumber internet untuk membantu analisis dan interpretasi fenomena yang lebih akurat. Peneliti akan menggabungkan beberapa dokumen yang menceritakan kejadian Sudan dan SPLA melalui jurnal penelitian.

³⁵ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014) Tanpa hlm.

³⁶ Audie Klotz dan Deepa Prakash, *Qualitative Methods in International Relations: a Pluralist Guide* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011). hlm, 43

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I adalah **Pendahuluan** yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah yang terbagi dalam Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah, dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah **Upaya Politik Penduduk Kristen Menghadapi Diskriminasi Penduduk Islam** yang berisi data objek yang menjadi sekuritisasi politik pada penelitian ini dan bentuk ancaman politik terhadap objek sekuritisasi. Penjelasan mengenai bentuk diskriminasi juga akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab-sub babnya.

Bab III adalah **Dampak Sekuritisasi Politik Terkait Identitas Penduduk Kristen Sudan sehingga berhasil memerdekakan Sudan bagian Selatan** yang berisikan analisis data literatur mengenai perjuangan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi menyadarkan penduduk Kristen bahwa ancaman dari penduduk Islam harus dimusnahkan dengan cara melakukan *speech act* dengan bantuan instansi dalam negeri dan media. Bab ini juga akan membahas mengenai dampak yang dialami penduduk Sudan setelah terjadinya implementasi CPA.

Bab IV adalah **Kesimpulan** yang berisikan hasil analisa antara data dan analisis literatur di bab II dan III. Kesimpulan akan melihat aspek sejarah konflik dan melihat upaya yang dilakukan oleh organisasi dan pemimpinnya dalam meraih hak politik yang seharusnya mereka dapatkan yaitu kemerdekaan.